

**ANALISIS PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM, JUMLAH
PENDUDUK, DAN PDRB TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 – 2021**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Nama : Fransisca Cindy Belinda
NIM : 19313211
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2023

**ANALISIS PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM, JUMLAH
PENDUDUK, DAN PDRB TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 – 2021**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Fransisca Cindy Belinda

NIM : 19313211

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2023

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2023

Penulis,



Fransisca Cindy Belinda

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM, JUMLAH
PENDUDUK, DAN PDRB TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 – 2021**

Nama : Fransisca Cindy Belinda
NIM : 19313211
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 10 Maret 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Kenaikan Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah



Disusun oleh : FRANSISCA CINDY BELINDA

Nomor Mahasiswa : 19313211

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 12 April 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Penguji : Priyonggo Suseno, SE., M.Sc.


.....

.....

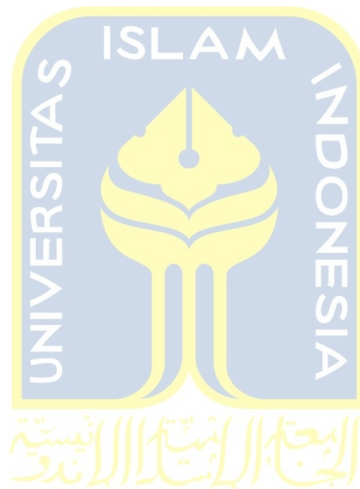
Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia




Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. *atr*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Terima kasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga atas limpahan kasih sayang, doa, serta dukungan untuk dapat menyelesaikan kuliah hingga akhir. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diberikan nikmat sehat yang tidak pernah putus



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Pengaruh Kenaikan Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2021** yang mampu diselesaikan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Penyusunan skripsi yang dilakukan dengan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu sangat dibutuhkannya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, penelitian ini dapat membawa manfaat untuk banyak pihak.

Pada proses penyusunan skripsi, telah banyak bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Hendri Subono dan Ibu Tri Astuti tercinta serta Adik saya satu – satunya yaitu Alexandra Felice Belinda. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya yang tidak pernah putus dan limpahan kasih sayang yang selalu diberikan.

3. Kepada Mami Meilan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menginjakkan kakinya dibangku perkuliahan. Terima kasih atas keikhlasannya serta doa, semangat, dan dukungan sehingga dapat tetap berada pada titik ini.
4. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini. Terima kasih telah membimbing dan memberikan masukan serta arahan dengan sabar terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan bimbingannya selama ini.
8. Teman rasa keluarga Eka dan Ulfa yang telah memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih telah membantu penulis agar tidak stres dan tetap bertahan sampai pada titik ini.
9. Seluruh teman – teman FBE UII khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu – satu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis sangat bersyukur karena diizinkan dikelilingi orang – orang baik yang telah memberikan dukungan dari awal kuliah hingga menyelesaikannya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diberikan nikmat sehat yang tidak pernah putus. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan demikian, semoga apa yang ada di dalam skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.2 Landasan Teori	16
2.3 Hubungan Antar Variabel	24
2.4 Kerangka Pemikiran	26
2.5 Hipotesis Penelitian	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	28
3.3 Metode Analisis.....	29
3.4 Model Estimasi Regresi Data Panel.....	30
3.5 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	33
3.6 Uji Statistik.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Analisis Deskriptif Data.....	36
4.2 Hasil dan Analisis Data.....	38
4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model.....	39
4.4 Pengujian Hipotesis.....	40
4.5 Analisis Ekonomi.....	41
4.6 Menghitung Perbedaan Intersep.....	44
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	46
5.1 Simpulan.....	46
5.2 Implikasi.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48

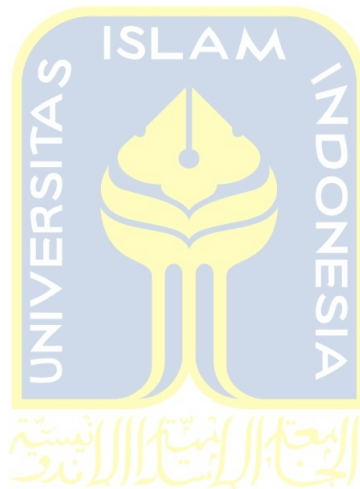
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kajian Pustaka	13
Tabel 1.2. Hasil Analisis Statistika Deskriptif	36
Tabel 1.3. Hasil Uji Chow	38
Tabel 1.4. Hasil Uji Hausman	38
Tabel 1.5. Hasil Model Fixed Effect	39
Tabel 1.6. Hasil Perbedaan Intersep	44



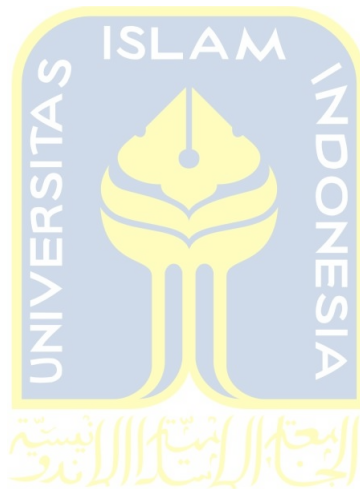
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Jawa Tengah	3
Grafik 1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jawa Tengah	4
Grafik 1.3. Pasar Tenaga Kerja	22
Grafiki 1.4. Kerangka Pemikiran	26



DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran 1: Data Penelitian.....	52
B. Lampiran 2: Common Effect Model.....	67
C. Lampiran 3: Fixed Effect Model.....	67
D. Lampiran 4: Random Effect Model.....	68
E. Lampiran 5: Uji Chow.....	69
F. Lampiran 6: Uji Hausman.....	69



ABSTRAK

Pembangunan ekonomi merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta sebagai upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia ini menggambarkan permasalahan klasik yaitu tingginya angka pengangguran. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Tahun 2011 – 2021 dalam bentuk data tahunan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yang tujuannya untuk menjelaskan tentang pengaruh upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Berdasarkan pada hasil uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat dan terbaik digunakan untuk mengestimasi dan menganalisis pengaruh upah minimum, jumlah penduduk, dan pdrb di Jawa Tengah adalah fixed effect model. Penelitian ini menghasilkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu upah minimum, jumlah penduduk, dan pdrb secara simultan atau bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dimana variabel upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif, sedangkan variabel PDRB berpengaruh negatif.

Kata kunci: Upah minimum, Jumlah penduduk, PDRB, Tingkat pengangguran terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk tinggi yang berarti tenaga kerja yang dimiliki diharapkan dapat membantu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada kenyataannya, jumlah penduduk yang tinggi serta kualitas dari tenaga kerja yang ada belum cukup untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini akan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi adalah kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta sebagai upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi Indonesia menggambarkan permasalahan yang sangat penting yaitu tingginya angka pengangguran. Menurut (Durrotul Mahsunah, 2012) dalam penelitiannya, pengangguran adalah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan berdasarkan dengan keterampilan dan pendidikan yang dimilikinya, akan tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan karena keterbatasan lapangan pekerjaan.

Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi karena nantinya peningkatan pada PDRB mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif berdampak positif terhadap ketenagakerjaan dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif dapat menyebabkan pengangguran. Besarnya angka pengangguran ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

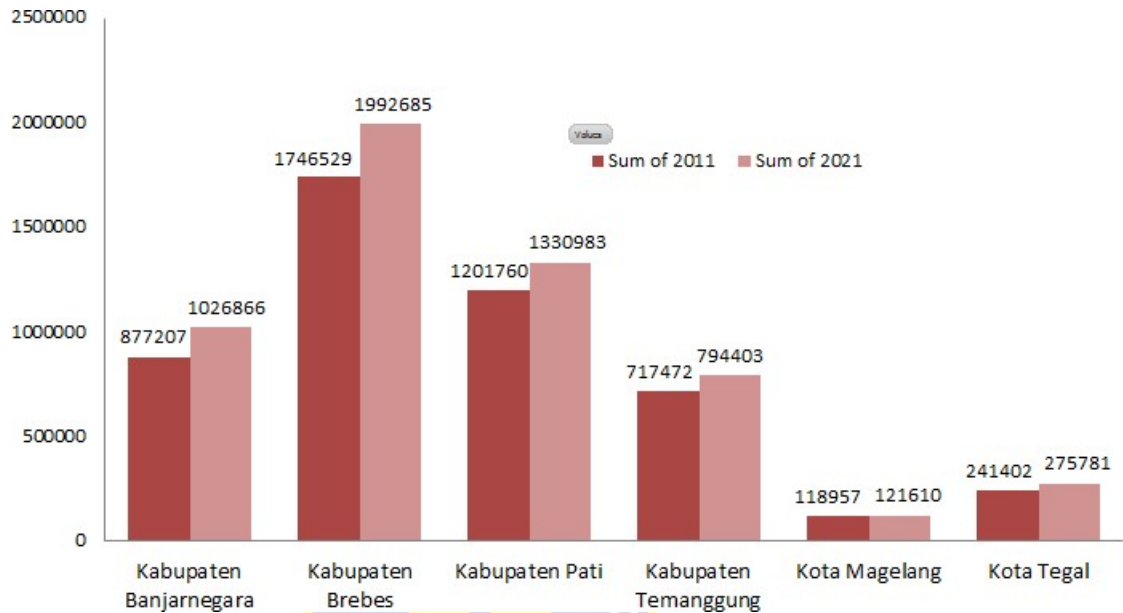
Indonesia ialah negara dengan sumber daya yang kaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini seharusnya mampu memberikan keuntungan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi pada

kenyataannya pemerintah belum dapat mengefisiensikan sumber daya tersebut. Akibatnya, banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadi pengangguran di negaranya sendiri. Tak hanya itu, semakin melonjaknya angka kelahiran yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, mampu menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Dengan ini banyak sekali yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu penguatan sumber daya manusia yang mengacu pada pengetahuan dan keterampilan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Alasan memilih provinsi Jawa Tengah yaitu karena tingkat pengangguran di Jawa Tengah menempati posisi kedua setelah Jawa Barat. Berdasarkan data BPS pada Tahun 2019-2021, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di Jawa Tengah berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 9,97% kemudian kedua disusul oleh Kabupaten Brebes sebesar 9,78%, Kota Semarang sebesar 9,54%, Kota Magelang sebesar 8,73%, dan Kota Tegal sebesar 8,25%. Kemudian mulai dari tahun 2011 – 2021, tingkat pengangguran terbuka paling rendah yaitu berada di Kabupaten Temanggung.

Selain itu, Jawa Tengah juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi atau memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta memiliki wilayah yang luas yaitu 35 Kabupaten/Kota yang memungkinkan terjadi ketimpangan. Sehingga saat ini masih sulit bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. sehingga menjadikan jumlah pengangguran terbuka terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang dialami oleh tenaga kerja yang sudah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal, akan tetapi belum juga mendapatkannya. Menurut (Sukirno 1994), pengangguran terbuka tercipta karena terjadi penambahan tenaga kerja akan tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

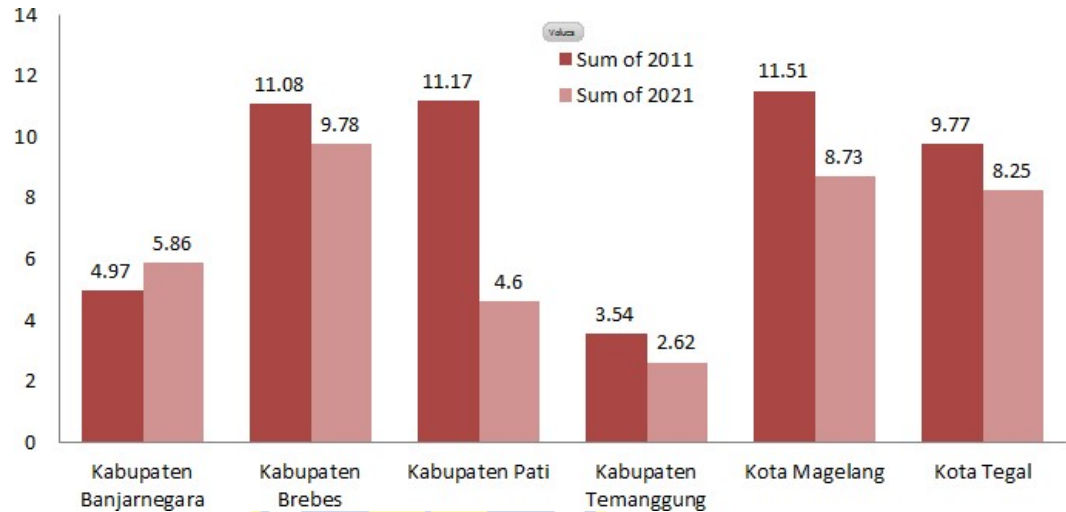
Grafik 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Jawa Tengah terus berfluktuasi. Pada tahun 2011 dan 2021 ditunjukkan jumlah penduduk terendah yaitu Kota Magelang. Kemudian jumlah penduduk tertinggi yaitu Kabupaten Brebes. Apabila jumlah penduduk terus meningkat, artinya dapat memperketat persaingan antar individu dalam memperoleh pekerjaan. Peningkatan angkatan kerja yang tinggi mampu memungkinkan terjadinya tingkat pengangguran yang tinggi karena adanya ketidakseimbangan dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja.

Grafik 1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Tahun 2011 dan 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Jawa Tengah terus berfluktuasi. Pada tahun 2011 diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka yang terendah yaitu berada di Kabupaten Temanggung dan yang tertinggi berada di Kota Magelang. Kemudian pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka yang terendah yaitu berada di Kabupaten Temanggung, sedangkan yang tertinggi berada di Kabupaten Brebes.

Pada penelitian ini terdapat beberapa faktor – faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB. Menurut Undang – Undang No 13 Tahun 2003, upah

adalah imbalan bagi pekerja yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang merupakan imbalan dari perusahaan untuk pekerja nya atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kenaikan **upah minimum** yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja karena upah minimum harus berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu seperti pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa upah terendah yang diberikan setiap bulan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan lainnya. Upah minimum menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran karena meningkatnya upah minimum dapat mengurangi permintaan tenaga kerja, sedangkan dari pihak tenaga kerja upah adalah sesuatu yang seharusnya diterima sebagai balas jasa dari waktu dan tenaga dalam bekerja. Oleh karena itu, upah ini menjadi salah satu faktor untuk menekan tingkat pengangguran.

Menurut (N. G. Mankiw 2006), upah adalah faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran, sehingga jumlah upah yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat pengangguran yang ada. Sedangkan, setiap kenaikan upah diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Sebaliknya, setiap penurunan upah diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan timbal balik dengan upah. Upah memengaruhi jumlah angkatan kerja karena apabila upah yang ditetapkan tinggi, maka akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi sehingga perusahaan akan melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja. Dengan pengurangan tenaga kerja ini maka akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada.

Selain upah minimum, terdapat faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran, yaitu **jumlah penduduk**. Penduduk adalah semua

orang yang berada di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih serta bertempat tinggal kurang dari 6 bulan guna menetap. Menurut (Firdhania & Muslihatinningsih, 2017), jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran karena jumlah penduduk serta angkatan kerja meningkat dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai untuk seluruh tenaga kerja yang ada. Dan dijelaskan juga pada teori kependudukan yang dikemukakan oleh Malthus yaitu bahwa penambahan penduduk tidak sejalan dengan sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Jumlah penduduk ini menyebabkan peningkatan pada permintaan tenaga kerja yang ada yang nantinya tidak mampu menyerap angkatan kerja sehingga dapat meningkatkan pengangguran.

Peningkatan angkatan kerja baru yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan GAP yang terus membesar sehingga kondisi ini akan semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi, tidak saja GAP antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan pekerjaan baru dan dengan penyediaan lapangan kerja yang semakin rendah, tetapi juga akan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang nantinya meningkatkan pengangguran dari tahun ke tahun (Amir 2007).

Indikator lainnya yaitu **PDRB**. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto atau jumlah barang dan jasa akhir yang mampu dihasilkan oleh seluruh unit di wilayah tertentu. PDRB ini menjadi indikator ekonomi makro yang menggambarkan tentang bagaimana keadaan suatu perekonomian di suatu wilayah. Pemerintah melakukan kebijakan untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan cara meningkatkan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan ekonomi akan semakin baik (Todaro dan Smith, 2008). PDRB yang

meningkat memungkinkan meningkatkan kapasitas produksi sehingga diharapkan dapat memberikan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dan memperluas kesempatan kerja sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran yang ada dan PDRB yang rendah akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Permadi & Chrystanto, 2021) menyatakan bahwa UMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian oleh (Laurensius, 2018) menyatakan bahwa laju PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian oleh (Suhadi & Setyowati, 2022) menyatakan bahwa upah minimum dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian oleh (Hajji dan Nugroho, 2013) menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka dan PDRB tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian oleh (Priastiwi dan Herniawati, 2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari upah minimum, jumlah penduduk, dan pdrb terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2011 – 2021. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian - penelitian terdahulu. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Priastiwi dan Herniawati, 2019) terdapat variabel pendidikan, namun di penelitian ini tidak diikutsertakan variabel tersebut dan untuk variabel lainnya sama yaitu seperti upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB. Penelitian oleh (Gunawan & Nuzula, 2020) tidak terdapat variabel jumlah penduduk seperti pada penelitian ini. Pada penelitian oleh (Permadi & Chrystanto, 2021) dilakukan uji

multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dari penelitian – penelitian yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan yang cukup jelas yaitu pada rentang waktu yang diambil. Pada penelitian ini mengambil rentang waktu 10 tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat serta merata pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh dari upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yaitu pengangguran di Jawa Tengah

2. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan dalam penelitian lain.

3. Bagi Penulis

Penelitian dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ekonomi pada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta diharapkan mampu memahami faktor – faktor apa saja yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan wawasan baru mengenai permasalahan ekonomi yang ada di daerah nya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 5 Bab, diantaranya yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Berisi kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang mungkin memiliki persamaan dan membandingkannya. Bab ini juga berisi landasan teori yang menjelaskan teori pada setiap variabel serta hubungan antar variabel yang digunakan.

3. Bab III Metode Penelitian

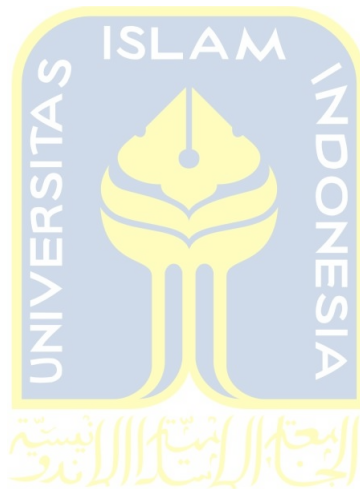
Berisi jenis data dan metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi data, hasil olah data, analisis serta pembahasan lebih mendalam mengenai penelitian yang telah dilakukan.

5. Bab V Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran yang ditunjukkan untuk pemerintah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang memiliki topik penelitian yang relevan dengan tingkat pengangguran terbuka akan dijelaskan pada bagian kajian pustaka dengan tujuan untuk mendukung dan mempertegas penelitian yang dilakukan ini. Hal ini sangat penting karena permasalahan yang diangkat pada beberapa penelitian terdahulu sangat relevan dan erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tingkat pengangguran terbuka, khususnya di Jawa Tengah.

Seperti penelitian oleh Pramudjasi, dkk (2019) yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan serta Upah Terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser. Peneliti menggunakan variabel independen seperti jumlah penduduk, pendidikan, dan upah serta dengan variabel dependen berupa tingkat pengangguran. Hasil dari penelitian ini yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif, pendidikan tidak berpengaruh, dan upah berpengaruh negatif.

Penelitian oleh Kasanah, dkk (2018) yaitu Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2014 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan literatur lainnya. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu upah minimum, angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi serta variabel dependennya adalah pengangguran terbuka. Hasil yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif, angkatan kerja berpengaruh positif, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan.

Priastiwi & Herniawati (2019) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Pendidikan, dan Upah Minimum

Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015. Peneliti menggunakan variabel independen seperti jumlah penduduk, pdrb, pendidikan, dan upah minimum serta dengan variabel dependen berupa tingkat pengangguran terbuka. Hasil dari penelitian ini yaitu semua variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015.

Penelitian Rhivna, dkk (2019) meneliti tentang Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi dengan menggunakan data sekunder dan variabel independen berupa PDRB, upah minimum provinsi, inflasi, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu pengangguran terbuka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pdrb dan investasi berpengaruh negatif, upah minimum dan inflasi berpengaruh positif, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

M. Satrio Alridho (2018) meneliti tentang Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 2002 – 2016 dengan menggunakan variabel independen berupa pdrb, inflasi, dan upah minimum, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pdrb berpengaruh negatif, inflasi berpengaruh positif, sedangkan upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan.

Suhadi & Setyowati (2022) yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2020 pada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan variabel independen jumlah penduduk, upah minimum, dan pdrb sedangkan variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Hasil yang diperoleh yaitu

pendidikan, upah minimum, dan pdrb berpengaruh signifikan, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shun & Nugroho (2013); Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 – 2011 yang menghasilkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 1.1. Kajian pustaka

No	Keterangan	Hasil Penelitian	Persamaan Dengan Skripsi	Perbedaan Dengan Skripsi
1	Rangga Pramudjasi T, Juliansyah, Diana Lestari (2019); Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan serta Upah Terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan - Pendidikan tidak berpengaruh - Upah memiliki pengaruh negatif dan signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat pengangguran - Menggunakan variabel independen yang sama yaitu jumlah penduduk dan upah - Menggunakan data sekunder dan model regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen berupa pendidikan
2	Yunani Tiya Kasanah, Anifatul Hanim, P. Edi Suswandi (2018);	<ul style="list-style-type: none"> - Upah minimum memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel dependen yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen

	Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2014	<p>pengaruh negatif dan signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan - Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 	<p>sama yaitu tingkat pengangguran terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen yang sama yaitu upah minimum - Menggunakan data sekunder dan model regresi berganda 	<p>berupa angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun dan rentang waktu penelitian
3	Dian Priastiwati, Herniwati Retno Handayani (2019); Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Secara simultan semua variabel independen berpengaruh secara signifikan - Jumlah penduduk berpengaruh positif - Pendidikan berpengaruh negatif - Upah minimum berpengaruh negatif - PDRB berpengaruh negatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat pengangguran terbuka - Menggunakan model regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen berupa pendidikan

4	Rhivna Cilviyani Rambe, Purwaka Hari Prihanto, Hardiani (2019); Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB berpengaruh negatif dan signifikan - Upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan - Inflasi berpengaruh positif dan signifikan - Investasi berpengaruh negatif dan signifikan - Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat pengangguran terbuka - Menggunakan model regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen berupa inflasi, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja
5	M. Satrio Alridho (2018); Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 2002 – 2016	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan - Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan - Upah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat pengangguran terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen berupa inflasi - Tahun dan rentang waktu penelitian

		minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan		
6	Fajar Rini Suhadi, Eni Setyowati (2022); Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk tidak berpengaruh - Pendidikan, upah minimum, dan pdrb berpengaruh secara signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat pengangguran terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen berupa pendidikan
7	Muhammad Shun Haji, Nugroho SBM (2013); Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 – 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Semua variabel independen berpengaruh secara positif dan signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat pengangguran terbuka - Pengambilan lokasi penelitian yaitu Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen berupa inflasi dan angka melek huruf - Tahun penelitian

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah salah masalah dalam ruang lingkup makro ekonomi yang menjadi penghambat dalam pembangunan daerah karena dapat berdampak pada masalah – masalah sosial lainnya (Yehosua et al., 2019). Sedangkan menurut (Yanuar 2009), pengangguran merupakan keadaan di mana angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum juga mendapatkan atau dapat dikatakan sebagai angkatan kerja yang menganggur. Angkatan kerja adalah penduduk yang masuk dalam usia produktif yaitu 15 tahun atau lebih yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara belum bekerja, serta tidak bekerja atau menganggur.

Sedangkan menurut (Mankiw 2003), pengangguran yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkannya. Pengangguran disebabkan oleh tidak seimbangnya pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi dari jumlah tenaga kerja yang diminta.

b. Jenis – Jenis Pengangguran

Menurut (BPS 2017), pengangguran dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu antara lain:

1. Pengangguran terbuka atau penuh, yaitu orang – orang yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan.
2. Setengah menganggur terpaksa, yaitu orang – orang yang bekerja tetapi memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu yang disebabkan oleh faktor – faktor diluar keinginannya karena belum memperoleh pekerjaan walaupun mereka sudah berusaha mencari dan bersedia untuk bekerja meskipun dengan upah yang rendah.

3. Setengah menganggur sukarela, yaitu orang – orang yang memilih untuk menganggur dibandingkan dengan memperoleh pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya atau upah yang diharapkan.

Sedangkan menurut (Rosa, 2022), jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya yaitu terdiri dari:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan kualifikasi bagi para pekerja dengan pekerjaan yang tersedia.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Pengangguran ini terjadi karena perubahan pada barang dan jasa yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja yang ada karena ketidaksesuaian antara keahlian serta lokasi dari tenaga kerja tersebut sehingga dapat mengubah struktur ekonomi.
3. Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja.
4. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena siklus bisnis atau dapat dikatakan pengangguran yang terkena dampak dari naik turunnya perekonomian di suatu negara.

c. Dampak Pengangguran

Menurut

(Franita, 2016), pengangguran dapat berdampak pada penurunan tingkat perekonomian suatu negara, ketidakstabilan politik, serta berdampak pada investor. Selain itu, banyak dampak yang

ditimbulkan akibat dari pengangguran, yaitu seperti meningkatnya angka kemiskinan karena menurunnya tingkat pendapatan sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Pengangguran juga berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian (Muhadir, 2015) diantaranya yaitu:

1. Masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmurannya karena pendapatan riil yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan potensial atau yang seharusnya. Oleh karenanya, kemakmuran yang dicapai masyarakat pun menjadi lebih rendah.
2. Terjadinya penurunan pendapatan nasional yang diperoleh dari sektor pajak karena rendahnya pendapatan masyarakat akibat penurunan kegiatan perekonomian menyebabkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi menurun. Apabila penerimaan pajak menurun, maka kegiatan ekonomi pemerintah berkurang sehingga kegiatan pembangunan menjadi terhambat.
3. Berkurangnya daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap barang – barang hasil produksi menjadi menurun sehingga menyebabkan ketidaktertarikan para investor untuk melakukan perluasan. Sehingga dengan demikian, tingkat investasi akan menurun dan menjadikan tidak terpacunya pertumbuhan ekonomi.

d. Kebijakan Pemerintah

Menurut (Movanita 2018), terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Mendorong investasi dan ekspor dalam rangka untuk menciptakan lapangan pekerjaan
2. Meningkatkan keahlian bagi para tenaga kerja
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
4. Menciptakan hubungan industri yang baik antara pekerja dan pemberi kerja

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka ialah orang – orang yang tidak bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan yang layak. Pengangguran ini masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara – negara berkembang termasuk Indonesia karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas serta pendapatan masyarakat menjadi menurun sehingga dapat menimbulkan masalah – masalah baru yang dapat membahayakan kondisi perekonomian dan sosial suatu negara (Rhivna Cilviyani Rambe, Purwaka Hari Pihanto, 2018).

Tingkat pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang dialami oleh tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Pengangguran ini tergolong jenis pengangguran yang jumlahnya cukup banyak karena kondisinya yaitu tidak memperoleh pekerjaan walaupun sudah berusaha mencari semaksimal mungkin. Pengangguran ini tidak melakukan pekerjaan sehingga sangat nyata, oleh karena itu disebut dengan pengangguran terbuka.

Sedangkan menurut BPS, pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau dapat dikatakan pengangguran full timer mencari pekerjaan, dan bisa juga orang yang sedang mempersiapkan usaha serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja. Selain itu,

pengangguran terbuka dapat dikatakan sebagai mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran merupakan kunci dari kinerja perekonomian dan menunjukkan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan dipengaruhi oleh tingkat produksi dan pengeluaran perusahaan. Penurunan tingkat pengangguran akan menjadi indikator yang baik bagi perekonomian Indonesia karena perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Akibatnya, tingkat pengangguran dan jumlah orang yang bekerja akan meningkat (Kaufman and Hotchkiss 1999).

Secara umum, pengangguran terbuka terjadi karena adanya ketidakseimbangan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, minimnya pengalaman yang dimiliki oleh calon pekerja sedangkan lowongan pekerjaan tersebut membutuhkan pengalaman kerja yang cukup (hal ini biasanya terjadi pada fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan). Tak hanya itu, pengangguran ini juga disebabkan oleh tidak sesuainya antara keterampilan yang dimiliki serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

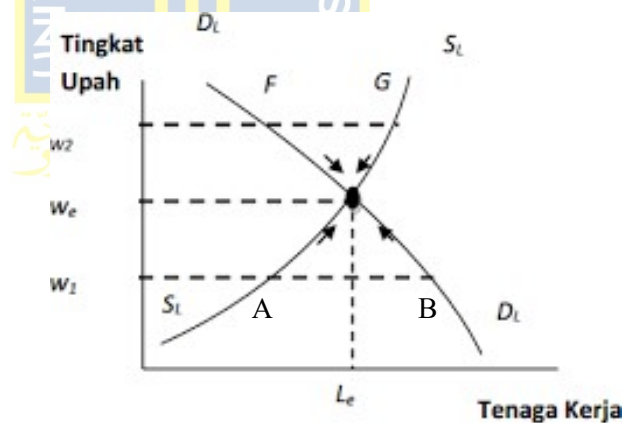
2.2.3 Upah Minimum

Upah minimum adalah hak pekerja yang diberikan setiap bulan sebagai imbalan atas pekerjaannya yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas. Menurut (Alridho, 2018), upah minimum yang ditetapkan menjadi permasalahan antara pekerja dan perusahaan karena upah minimum yang tinggi dapat memberatkan perusahaan, namun perusahaan harus selektif dalam memilih tenaga kerja yang produktif. Sehingga akibatnya upah minimum dapat menyebabkan pengangguran.

2.2.4 Pasar Tenaga Kerja

Permasalahan yang ada pada bidang angkatan kerja yaitu tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu di pasar tenaga kerja. Menurut (Kaufman and Hotchkiss 1999), upah yang tidak fleksibel menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran di pasar tenaga kerja. Upah minimum yang telah ditetapkan dapat menimbulkan kekakuan upah. Kekakuan upah yaitu kegagalan upah dalam penyesuaian antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Upah yang berada di atas titik keseimbangan menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja tinggi dari pada permintaan tenaga kerja. Apabila penawaran tenaga kerja tinggi, maka angkatan kerja tidak dapat seluruhnya ditampung oleh perusahaan. Oleh karena itu, kondisi ini dapat meningkatkan pengangguran.

Grafik 1.3. Pasar Tenaga Kerja



- Titik keseimbangan pasar berada pada titik (L_e, W_e) . Titik ini menggambarkan kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja sama besarnya.
- Penurunan produksi akan menyebabkan perubahan permintaan tenaga kerja yaitu akan menggeser D_L ke kiri.

- Pada persaingan sempurna, upah akan turun dari W_e ke W_1 yang menurunkan penawaran tenaga kerja sehingga akan merubah titik keseimbangan.
- Apabila upah tidak fleksibel untuk turun, maka pada titik W_e akan meningkatkan jumlah pengangguran karena perusahaan hanya ingin menyerap jumlah tenaga kerja yang berada pada titik A, sedangkan penawarannya berada pada B. Oleh karena itu, dalam teori kekakuan upah, dijelaskan bahwa permasalahan utama yaitu ketidakmampuan lapangan kerja yang ada untuk memenuhi penawaran tenaga kerja. Menurut (Priastiwi dan Herniawati, 2019), teori ini berbeda dengan teori klasik yang menyatakan bahwa upah yaitu sifatnya fleksibel yang berarti bahwa kurva pasar tenaga kerja akan kembali pada titik keseimbangan yang berarti bahwa tidak ada kelebihan permintaan ataupun penawaran tenaga kerja.

2.2.5 Jumlah Penduduk

Menurut BPS, penduduk didefinisikan sebagai semua orang yang tinggal selama 6 bulan atau lebih dan tinggal kurang dari 6 bulan dalam satu wilayah geografis untuk menetap. Penduduk adalah orang-orang yang termasuk sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan jumlah penduduk yang mendiami suatu tempat dalam suatu wilayah tertentu (Triyono, 2020). Penduduk dibagi menjadi kategori bekerja dan tidak bekerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, bekerja tetapi menganggur sementara dan menganggur. Seseorang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja apabila ia berusia produktif tetapi tidak bekerja, seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan pensiun.

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS, PDRB merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan keadaan perekonomian suatu negara atau wilayah pada periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada dasarnya PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di negara tersebut. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan mengacu pada harga dasar pada tahun tertentu.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Antara Upah Minimum dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah yang diberikan oleh perusahaan perlu diperhatikan apakah sudah sesuai dengan kemampuan dan kinerja yang dihasilkan oleh para pekerja. Apabila kenaikan upah tidak diikuti dengan kinerja dari pekerja tersebut atau memiliki kinerja yang rendah maka akan memengaruhi keuangan dari suatu perusahaan karena tidak sesuainya antara biaya produksi yang dikeluarkan dengan produk yang dihasilkan. Sedangkan, apabila upah yang diberikan terlalu rendah namun produktivitas yang dimiliki oleh pekerja tinggi maka menyebabkan pekerja berhenti bekerja dan lebih memilih menganggur sehingga dapat meningkatkan jumlah pengangguran (Pramudjasi et al., 2019).

Menurut (Kasanah et al., 2018), upah berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Apabila upah yang ditetapkan tinggi, maka hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi sehingga

perusahaan akan melakukan suatu efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Pengurangan terhadap tenaga kerja ini nantinya dapat meningkatkan jumlah pengangguran sehingga tingkat pengangguran terbuka semakin tinggi.

2.3.2 Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Semakin tahun jumlah penduduk mengalami kenaikan yang tinggi, bertambahnya jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan munculnya permasalahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang dinamis. Pertumbuhan penduduk dengan tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan meningkatnya jumlah angka pengangguran.

Menurut (Pramudjasi. et al., 2019), kondisi ini dapat memungkinkan meledaknya jumlah pengangguran karena penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dapat memicu terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena dunia kerja tidak dapat sepenuhnya menyerap tenaga kerja, oleh karena itu dapat menimbulkan pengangguran dan menjadikan semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka.

2.3.3 Hubungan Antara PDRB dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

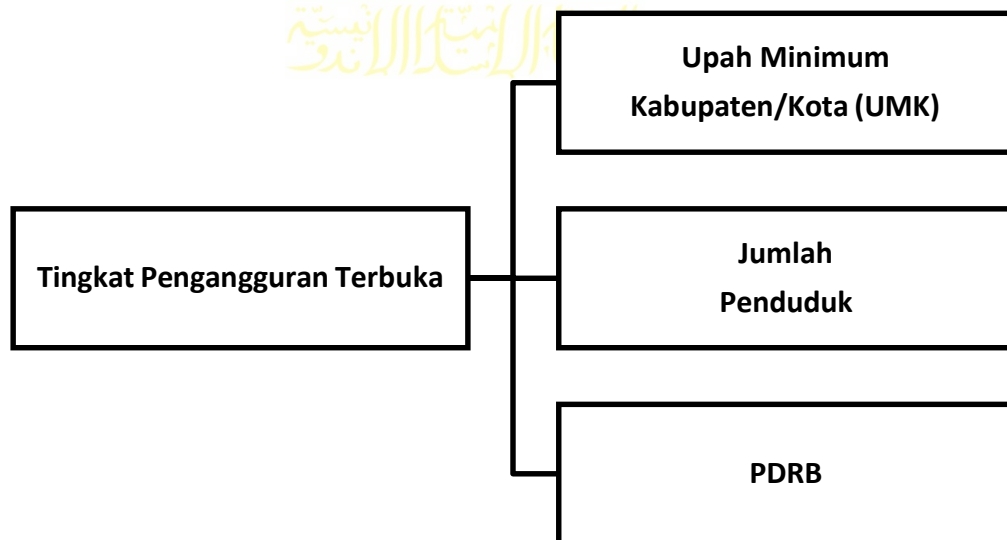
(Dharmayanti, 2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai setiap kenaikan pdrb tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung dapat menciptakan

lapangan pekerjaan. PDRB yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut, karena dengan kenaikan pdrb dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan, apabila pdrb mengalami penurunan maka dapat meningkatkan jumlah angka pengangguran.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang berisi teori yang ada kaitannya dengan faktor – faktor permasalahan yang menjelaskan berbagai gejala yang menjadi objek dalam penelitian dan sangat berguna untuk menyusun hipotesis (Amirullah 2002). Kerangka pemikiran ini berupa bagan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang merupakan alur logika yang ada di dalam suatu penelitian.

Grafik 1.4. Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah menggambarkan dugaan atau pernyataan secara singkat, padat, dan jelas tentang hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian yang dilakukan (Cooper and Schindler 2011). Hipotesis disusun untuk menjawab pertanyaan pada penelitian berdasarkan dari penalaran yang berbasis pada teori. Oleh karena itu, hipotesis penting untuk dibuktikan kebenarannya karena masih bersifat sementara. Pada penelitian ini diperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka
2. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka
3. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Tahun 2011 – 2021 melalui web resmi <https://jateng.bps.go.id> dalam bentuk data tahunan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang tujuannya untuk menjelaskan tentang pengaruh upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam bentuk angka.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Data yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011 – 2021 dalam satuan persen (%).

3.2.2 Variabel Independen (X)

- **Upah Minimum (X1)**

Upah minimum merupakan hak pekerja yang diberikan setiap bulan sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan atas perjanjian yang telah disepakati. Menurut Pasal 89 UU No 13 Tahun 2003, upah yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan atas

kebutuhan hidup layak serta dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Jumlah penduduk (X2)

Penduduk merupakan semua orang yang berada di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap. Jumlah penduduk dinyatakan dalam satuan jiwa.

- PDRB (X3).

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dengan dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar. PDRB ini dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak terpengaruh oleh adanya faktor harga. Pada penelitian ini menggunakan PDRB riil tahun dasar 2010

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data cross section dan time series. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut (Gujarati, Damodar 2003) , data panel ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan data time series atau cross section karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu:

- a. Merupakan data yang besar sehingga akan menghasilkan estimasi yang lebih baik karena memiliki nilai df yang besar. Oleh karena itu dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat.
- b. Dapat mengurangi kolinearitas variabel.

- c. Dengan menggabungkan informasi dari data time series dan cross section, maka dapat mengatasi permasalahan yang timbul akibat penghilangan variabel.

Model yang digunakan untuk mengestimasi yaitu:

$$Y_{it} = B_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

Y	: Tingkat pengangguran terbuka
X ₁	: Upah minimum
X ₂	: Jumlah penduduk
X ₃	: PDRB
B ₀	: Konstanta
B ₁ , B ₂ , dan B ₃	: Koefisien regresi
i	: Entitas ke – i (banyaknya observasi)
t	: Periode ke – t (banyaknya waktu)
e	: Error

3.4 Model Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga model yang digunakan untuk melakukan estimasi regresi data panel:

3.4.1 Common Effect Model (CEM)

Common effect model merupakan teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan menggabungkan data time series dan cross section. Namun, common effect hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan waktu dan individu sehingga dikatakan model ini sama dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Pada beberapa studi data panel, model ini jarang digunakan sebagai estimasi utama karena sifat model yang tidak membedakan perilaku data. Model regresi data panel dengan menggunakan CEM dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = B_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \quad (2)$$

Keterangan:

- Y : Tingkat pengangguran terbuka
- X₁ : Upah minimum
- X₂ : Jumlah penduduk
- X₃ : PDRB
- B₀ : Konstanta
- B₁, B₂, dan B₃ : Koefisien regresi
- i : Entitas ke – i (banyaknya observasi)
- t : Periode ke – t (banyaknya waktu)
- e : Error

3.4.2 Fixed Effect Model (FEM)

Pada fixed effect model, estimasi dapat dilakukan tanpa pembobot (no weight) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) dan dengan pembobot (cross section weight) atau General Least Square (GLS). Tujuan dari pembobot ini yaitu untuk mengurangi heterogenitas antar cross section (Gujarati 2012). Model ini tepat digunakan untuk melihat perilaku data dari setiap variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasikan data. Pemilihan model FEM yaitu dengan ketentuan apabila nilai probabilitas signifikan dengan alpha. Menurut (Widarjono 2007), model FEM mengasumsikan bahwa intersep tiap individu yaitu berbeda, sedangkan slope antar individu yaitu sama. Model regresi data panel dengan menggunakan FEM dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = B_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \dots + e_{it} \quad (3)$$

Keterangan:

- Y : Tingkat pengangguran terbuka
- X_1 : Upah minimum
- X_2 : Jumlah penduduk
- X_3 : PDRB
- B_0 : Konstanta
- $B_1, B_2, \text{ dan } B_3$: Koefisien regresi
- $D_1 \text{ dan } D_2$: Dummy
- i : Entitas ke – i (banyaknya observasi)

t : Periode ke – t (banyaknya waktu)

e : Error

3.4.3 Random Effect Model (REM)

Random effect model merupakan model estimasi dengan penambahan variabel gangguan (error terms) yang memungkinkan muncul pada hubungan antar waktu dan antar individu. Dengan menggunakan model ini mampu menghemat penggunaan derajat kebebasan dan tidak akan mengurangi jumlahnya seperti pada fixed effect model. Hal ini berimplikasi pada parameter yang hasil estimasi nya menjadi semakin efisien. Pemilihan model REM dapat melalui uji hausman.

3.5 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.5.1 Uji Chow

Uji chow adalah uji yang digunakan untuk memilih model yang paling tepat dalam mengestimasi data panel antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hipotesis pada uji chow, yaitu:

H_0 : Memilih Common Effect Model

H_1 : Memilih Fixed Effect Model

Apabila menerima H_0 , maka model yang paling tepat digunakan adalah CEM. Sedangkan apabila menolak H_0 , maka model yang paling tepat digunakan adalah FEM.

3.5.2 Uji Hausman

Uji hausman adalah uji yang digunakan untuk memilih model yang paling tepat dalam mengestimasi data panel antara Fixed Effect Model

(FEM) dan Random Effect Model (REM). Hipotesis pada uji hausman, yaitu:

H_0 : Memilih Random Effect Model

H_1 : Memilih Fixed Effect Model

Apabila menerima H_0 , maka model yang paling tepat digunakan adalah REM. Sedangkan apabila menolak H_0 , maka model yang paling tepat digunakan adalah FEM.

3.6 Uji Statistik

3.6.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu dengan membandingkan antara F hitung dan F tabel. Kesimpulannya apabila F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen sama - sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Apabila t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji t

dilakukan terhadap koefisien regresi, apabila sama dengan 0 maka artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila tidak sama dengan 0, maka artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Akar dari R^2 menunjukkan hubungan erat antara variabel independen dan dependen. Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan 0, maka artinya variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi sama dengan 1, maka artinya variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan memiliki hubungan yang semakin erat. Oleh karena itu, baik atau buruknya persamaan regresi ditentukan oleh R square yang memiliki nilai antara 0 dan 1.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis deskriptif data setiap variabel yang digunakan hingga analisis pengaruh dari masing – masing variabel bebas yaitu upah minimum, jumlah penduduk, dan pdrb terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data panel dengan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011 – 2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Jawa Tengah yang berjumlah 350 data. Data yang diperoleh ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan Eviews 10. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk menentukan metode mana yang tepat untuk digunakan. Metode tersebut terdiri dari common effect model, fixed effect model, dan random effect model.

4.1 Analisis Deskriptif Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari web resmi. Hasil statistik data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.2.
 Hasil Analisis Statistika Deskriptif

	Tingkat Pengangguran Terbuka	Upah Minimum	Jumlah Penduduk	PDRB
Mean	5.512943	1391467	980030.4	24081194
Median	5.225000	1418550	934666.0	17763114
Minimum	1.500000	717000.0	118957.0	4255662
Maximum	11.98000	2810025	1992685	1.45E+08
Standar Deviasi	1.940621	480864.7	419606.5	22708373

Berdasarkan pada tabel 1.1 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi sampel, diperoleh nilai rata – rata variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,513% dengan jumlah tertinggi yaitu 11,980% dan jumlah terendah 1,50%. Standar deviasi sebesar 1,940 lebih kecil dari nilai rata-rata berarti menunjukkan variabel dependen memiliki variasi yang rendah.

Variabel upah minimum memiliki nilai rata – rata sebesar Rp 1.391.467 dengan jumlah tertinggi Rp 2.810.025 dan jumlah terendah Rp 717.000. Standar deviasi sebesar 480.864,7 lebih kecil dari nilai rata – rata berarti menunjukkan variabel upah minimum memiliki variasi yang rendah.

Variabel jumlah penduduk memiliki nilai rata – rata sebesar 980.030,4 jiwa dengan jumlah tertinggi 1.992.685 jiwa dan jumlah terendah 118.957 jiwa. Standar deviasi sebesar 419.606,5 lebih kecil dari nilai rata – rata berarti menunjukkan variabel jumlah penduduk memiliki variasi yang rendah.

Variabel pdrb memiliki nilai rata – rata sebesar Rp 24.081.194 dengan jumlah tertinggi Rp 14.500.000.000 dan jumlah terendah RTp 4.255.662. Standar deviasi sebesar 22.708.373 lebih kecil dari nilai rata – rata berarti menunjukkan variabel pdrb memiliki variasi yang rendah.

4.2 Hasil dan Analisis Data

4.2.1 Uji Chow

Uji chow adalah uji yang digunakan untuk memilih model antara common effect model atau fixed effect model yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Hasil uji chow yaitu:

Tabel 1.3.
Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.767068	(34,312)	0.0000
Cross-section Chi-Square	320.737786	34	0.0000

Berdasarkan pada tabel 1.2, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari Alpha 0.05 artinya menolak H0. Kesimpulannya adalah model yang paling tepat digunakan adalah fixed effect model.

4.2.2 Uji Hausman

Uji hausman adalah uji yang digunakan untuk memilih model antara fixed effect model atau random effect model yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Hasil uji hausman yaitu:

Tabel 1.4.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	48.773283	3	0.0000

Berdasarkan pada tabel 1.3, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari Alpha 0.05 artinya menolak H0. Kesimpulannya adalah model yang paling tepat digunakan adalah fixed effect model.

4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Berdasarkan pada hasil uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat dan terbaik digunakan untuk mengestimasi adalah fixed effect model.



Tabel 1.5.
Hasil Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-35.89096	45.23767	-0.793387	0.4282
LOG (UPAH_MINIMUM)	1.645049	0.989200	1.663009	0.0973
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	12.15471	2.943437	4.129427	0.0000
LOG(PDRB)	-8.825378	1.993010	-4.428166	0.0000
Effect Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.628993	Mean dependent var	5.512943	
Adjusted R-squared	0.584995	S.D. dependent var	1.940621	
S.E. of regression	1.250164	Akaike info criterion	3.38664	
Sum squared resid	487.6282	Schwarz criterion	3.805501	

Log likelihood	-554.662	Hannan-Quinn criter	3.553362
F-statistic	14.29607	Durbin-Watson stat	1.355094
Prob (F-statistic)	0.000000		

$$Y_{it} = B_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

$$Y_{it} = -35.89096 + 1.645049X_{1it} + 12.15471X_{2it} - 8.825378X_{3it} + e_{it}$$

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji T

Uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu mampu memengaruhi variabel dependen.

a. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan pada tabel 1.4, koefisien pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka yang terestimasi adalah sebesar 1.645049 dan memiliki nilai probabilitas 0.0973 yang lebih besar dari alpha 5% tetapi lebih kecil dari alpha 10%. Sehingga H0 dapat ditolak pada alpha 10% dan upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya setiap kenaikan upah minimum sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung naik sebesar 1,65%.

b. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan pada tabel 4.1, koefisien pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka yang terestimasi adalah sebesar 12.15471 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari alpha 5% sehingga menolak H0 dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya semakin tinggi jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Jawa Tengah berarti menaikkan jumlah tingkat pengangguran terbuka. Setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung naik sebesar 12,15%.

c. Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan pada tabel 4.1, koefisien pengaruh pdrb terhadap tingkat pengangguran terbuka yang terestimasi adalah sebesar -8.825378 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari alpha 5% artinya menolak H₀. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pdrb berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya setiap kenaikan pdrb sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung turun sebesar 8.83%.

4.4.2 Uji F

Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama – sama mampu memengaruhi variabel dependen secara signifikan.. Berdasarkan pada tabel 1.4 hasil uji fixed effect model, diperoleh nilai F statistik sebesar 14.29607 serta nilai probabilitas sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari Alpha 0.05 maka artinya menolak H₀. Kesimpulannya adalah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan dan signifikan.

4.4.3 Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen atau dengan kata lain untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada tabel 1.4 hasil uji fixed effect model, diperoleh nilai R² sebesar 0.628993 yang artinya bahwa 62,80% variabel tingkat pengangguran terbuka dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan variabel lain diluar model menjelaskan sebesar 37,20%.

4.5 Analisis Ekonomi

4.5.1 Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Artinya, apabila upah minimum naik sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung naik sebesar 1,65%. Hal ini sesuai dengan penelitian (Hajji dan Nugroho, 2013) yang menjelaskan tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh upah minimum dan penelitian oleh (Ronny Pitartono, 2012) menjelaskan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Sedangkan menurut (N. G. Mankiw 2006), upah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka sehingga besar kecilnya upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Setiap kenaikan tingkat upah yang diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, berarti menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran (Alghofari 2010).

4.5.2 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Artinya, apabila jumlah penduduk naik sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung naik sebesar 12.15%. Hal ini sesuai dengan teori oleh Malthus dalam (Qadrunnada 2017) yang menyatakan bahwa masyarakat modern diartikan bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan menghasilkan tenaga daftar kerja yang semakin banyak jumlahnya. Namun, apabila tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada, maka akan menyebabkan persaingan antar masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Seperti penelitian yang

dilakukan oleh (Lukis Panjawa & Soebagiyo, 2014) bahwa jumlah penduduk memang memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasaja, 2013) bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Artinya apabila jumlah penduduk naik mengakibatkan pertambahan jumlah angkatan kerja, sehingga dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menyerap angkatan kerja sepenuhnya yang pada akhirnya menambah jumlah pengangguran.

4.5.3 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Artinya jika setiap kenaikan pdrb sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung turun sebesar 8.83%. Hal ini sesuai dengan teori Hukum Okun yang menyatakan bahwa apabila pengangguran terjadi, ada beberapa input tenaga kerja yang tersedia tidak digunakan yang berarti terdapat hilangnya produksi. Menurut (Muslim, 2014) dalam studinya mengatakan bahwa PDRB yang meningkat, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak di suatu wilayah karena PDRB yang meningkat memungkinkan meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan pada PDRB di suatu daerah dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan 2013) yang berjudul Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga, dan Jumlah Industri terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang menghasilkan pdrb berpengaruh negatif terhadap tingkat

pengangguran terbuka serta penelitian (Nur Fitri Yanti, 2017) bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel pengangguran.

4.6 Menghitung Perbedaan Intersep

Tabel 1.6.
Hasil Perbedaan Intersep

CROSSID	Coefficient	Effect	Intersep
Kabupaten Cilacap	-35.89096	7.351296	-28.539664
Kabupaten Banyumas	-35.89096	-3.224243	-39.115203
Kabupaten Purbalingga	-35.89096	-3.078685	-38.969645
Kabupaten Banjarnegara	-35.89096	-4.967254	-40.858214
Kabupaten Kebumen	-35.89096	-6.009975	-41.900935
Kabupaten Purworejo	-35.89096	-3.646131	-39.537091
Kabupaten Wonosobo	-35.89096	-3.915713	-39.806673
Kabupaten Magelang	-35.89096	-5.073675	-40.964635
Kabupaten Boyolali	-35.89096	-2.901544	-38.792504
Kabupaten Klaten	-35.89096	-2.823055	-38.714015
Kabupaten Sukoharjo	-35.89096	0.491172	-35.399788
Kabupaten Wonogiri	-35.89096	-4.261991	-40.152951
Kabupaten Karanganyar	-35.89096	0.069847	-35.821113
Kabupaten Sragen	-35.89096	0.802622	-35.088338
Kabupaten Grobogan	-35.89096	-7.89629	-43.78725
Kabupaten Blora	-35.89096	-3.275641	-39.166601
Kabupaten Rembang	-35.89096	-1.291785	-37.182745
Kabupaten Pati	-35.89096	-1.082195	-36.973155
Kabupaten Kudus	-35.89096	10.85614	-25.03482

Kabupaten Jepara	-35.89096	-5.173581	-41.064541
Kabupaten Demak	-35.89096	-4.737156	-40.628116
Kabupaten Semarang	-35.89096	0.143925	-35.747035
Kabupaten Temanggung	-35.89096	-3.983532	-39.874492
Kabupaten Kendal	-35.89096	2.264235	-33.626725
Kabupaten Batang	-35.89096	-1.482961	-37.373921
Kabupaten Pekalongan	-35.89096	-3.566409	-39.457369
Kabupaten Pemalang	-35.89096	-6.007317	-41.898277
Kabupaten Tegal	-35.89096	-2.474669	-38.365629
Kabupaten Brebes	-35.89096	-2.431775	-38.322735
Kota Magelang	-35.89096	14.83541	-21.05555
Kota Surakarta	-35.89096	10.76236	-25.1286
Kota Salatiga	-35.89096	11.57703	-24.31393
Kota Semarang	-35.89096	8.592644	-27.298316
Kota Pekalongan	-35.89096	3.684564	-32.206396
Kota Tegal	-35.89096	11.87433	-24.01663

Intersep diperoleh dari penjumlahan nilai koefisien regresi dengan nilai fixed effect. Nilai intersep terkecil memperlihatkan Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Kabupaten/Kota yang memiliki intersep terkecil yaitu Kabupaten Grobogan sekitar -43.78725. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai intersep terbesar yaitu Kota Magelang sebesar -21.05555. Kota Magelang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, akan tetapi dengan konstanta yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran otonom di Kota Magelang cukup rendah, yang berarti tingkat pengangguran tidak dipengaruhi oleh variabel yang digunakan pada penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menghasilkan:

1. Variabel bebas yaitu upah minimum, jumlah penduduk, dan pdrb secara simultan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan adanya hubungan searah. Artinya, apabila upah minimum naik sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung naik sebesar 1,65%.
3. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan adanya hubungan searah. Artinya, setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung naik sebesar 12,15%.
4. Variabel pdrb berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan apabila pdrb naik maka tingkat pengangguran terbuka akan turun. Artinya, setiap kenaikan pdrb sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka cenderung turun sebesar 8.83%.

5.2 Implikasi

Hasil dari penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan – temuan baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemerintah dalam menentukan

kebijakan yang berkaitan dengan upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dengan ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan memperhatikan upah yang digunakan sebagai balasan bagi para pekerja atas pekerjaannya. Kebijakan upah minimum yang ditetapkan diharapkan rasional baik untuk pekerja maupun pemberi kerja agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk ikut serta dalam program KB yang sebelumnya telah dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan dilakukan program ini, diharapkan mampu mengontrol jumlah angka kelahiran bayi sebagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
3. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan PDRB riil agar tetap stabil sebagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat masalah tingkat pengangguran terbuka disarankan untuk mengikutsertakan variabel – variabel lainnya contohnya seperti: tingkat pendidikan, jumlah angkatan kerja, dan pertumbuhan penduduk serta dengan jangka waktu yang jauh lebih panjang agar analisis yang dilakukan memperoleh hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan situasi di Indonesia. Selain itu juga perlu digunakan alat analisis yang tepat dalam penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid. 2010. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Alridho, M.S. 2018. Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 2002-2016. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 1-148.
- Amir, Amri. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Indonesia. *Jurnal Inflasi dan Pengangguran*.
- Amirullah, Widayat. 2002. *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: CV Cahaya Press.
- BPS. 2017. Konsep Tenaga Kerja. Accessed February 7. 2023. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>.
- Cooper and Schindler. 2011. *Business Research Methods*. New York: McGraw Hill Companies.
- Dharmayanti, Y. 2011. Analisis Pengaruh PDRB Upah dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2009. 1.
- Durrotul Mahsunah. 2012. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi*, 1-17.
- Firdhania, R., & Muslihatinningsih, F. 2017. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember Factors Affecting of Unemployment Rate in Jember Regency. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(1), 117-121.

- Franita, R. 2016. Analisis Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* , 1(3), 88–93.
- Gujarati. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Lima* . Jakarta : Salemba Empat .
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, B. T., & Nuzula, F. 2020. Dampak UMK dan PDRB Terhadap Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2015: Analisis Spasial Ekonometrik Impact of UMK and GRDP on Unemployment in Java Island 2015: 15 (1).
- Hajji dan Nugroho. 2013. Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah T Nugroho SBM Tahun 1990-2011. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 1-10.
- Kasanah, Y. T., Hanim, A., & Suswandi, P. E. 2018. Faktor - Faktor yang Memengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7727>
- Kaufman and Hotchkiss. 1999. *The Economic Labor Markets*. USA: Georgia State University.
- Kurniawan, Roby Cahyadi. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980 - 2011. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya: Malang*
- Laurensius, et al. 2018. Analisis Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2014. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7706>

- Lukis Panjawa, J., & Soebagiyo, D. 2014. Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 48–54.
- Mankiw. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Movanita. 2018. Ini Jurus Pemerintah agar Pengangguran Turun Pada Tahun 2019 . Accessed February 7, 2023.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/12/070600926/ini-jurus-pemerintah-agar-pengangguran-turun-pada-2019?page=all>.
- Muhadir. 2015. Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi. *Jurnal Al-Buhuts*, 11(1), 42–66.
[https://doi.org/10.1016/S0006-291X\(88\)80929-X](https://doi.org/10.1016/S0006-291X(88)80929-X)
- Muslim, M. R. 2014. Pengangguran terbuka dan determinannya. 15, 171–181.
- Nur Fitri Yanti. 2017. Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014. *E Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 4, April 2017 Hlm 138-149, Pengaruh Inflasi, Investasi, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014, 138-149.
- Permadi, E., & Chrystanto, E. 2021. Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018. 5(2).
- Pramudjasi., R., Juliansyah, & Lestari, D. 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan serta Upah terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser. *Kinerja*,

16(1), 69–77.

Prasaja, M. H. 2013. Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 72–84. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1983>

Priastiwi dan Herniawati. 2019. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 159.

Qadrunnada, L. 2017. Accessed February 7, 2023. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10415/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

Rhivna Cilviani Rambe, Purwaka Hari Prihanto, H. 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 137–146. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i3.5512>

Ronny Pitartono, B. H. 2012. Analisis Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 1997-2010. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1, 1–10.

Rosa, et al. 2022. *Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas*. *Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1), 220–234.

Suhadi, F. R., & Setyowati, E. 2022. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Pendidikan , Upah Minimum , Dan PDRB. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 879–888.

Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro* . Jakarta : PT. Raja Grasindo Perseda .

- Triyono, A. 2020. The Effect of Economic Growth and the Number of Population To the Unemployment Rate in Indragiri Hulu Regency. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 9(1), 51–60. <https://doi.org/10.34006/jmbi.v9i1.187>
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Ekonisia FBE Univesitas Islam Indonesia .
- Yanuar. 2009 . *Ekonomi Makro Suatu Analisis Untuk Konteks Indonesia* . Jakarta : Yayasan Mpu Ajar Artha .
- Yehosua, S. A., Rotinsulu, T. O., & Niode, A. O. 2019. Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 20–31.



LAMPIRAN

A. Lampiran 1 – Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	TPT	Upah Minimum	Jumlah Penduduk	PDRB
Kabupaten Cilacap	2011	10.82	718667	1655796	78156818.82
Kabupaten Cilacap	2012	7.29	773000	1666163	79702237.61
Kabupaten Cilacap	2013	6.68	887667	1676089	81022670.26
Kabupaten Cilacap	2014	5.65	1016667	1685573	83391500.18
Kabupaten Cilacap	2015	8.01	1195667	1694726	88357606.68
Kabupaten Cilacap	2016	-	1527000	1703390	92858649.84
Kabupaten Cilacap	2017	6.30	1693689	1711627	95254586.70
Kabupaten Cilacap	2018	7.49	1841209	1719504.00	98100568.17
Kabupaten Cilacap	2019	7.24	1989058.08	1727098.00	100327298.90
Kabupaten Cilacap	2020	9.10	2158327	1944857	90011584.10
Kabupaten Cilacap	2021	9.97	2228904	1963824	91944587.54
Kabupaten Banyumas	2011	6.61	750000	1574001	24538595.63
Kabupaten Banyumas	2012	5.11	79500	1590011	25982158.22
Kabupaten Banyumas	2013	5.45	877500	1605579	27793138.47
Kabupaten Banyumas	2014	5.37	1000000	1620918	29367687.40
Kabupaten Banyumas	2015	6.37	1100000	1635909	31164876.40
Kabupaten Banyumas	2016	-	1350000	1650625	33051046.65
Kabupaten Banyumas	2017	4.62	1461400	1665025	35147313.30
Kabupaten Banyumas	2018	4.15	1589000	1679124.00	37414500.58
Kabupaten Banyumas	2019	4.17	1750000	1693006.00	39779320.86
Kabupaten Banyumas	2020	6.00	1900000	1776918	39121623.57
Kabupaten Banyumas	2021	6.05	1970000	1789630	40686808.02

Kabupaten Purbalingga	2011	5.10	765000	860596	11474221.22
Kabupaten Purbalingga	2012	5.02	818500	870276	12138445.34
Kabupaten Purbalingga	2013	5.63	896005	879880	12778311.23
Kabupaten Purbalingga	2014	5.13	1023000	889214	13397712.78
Kabupaten Purbalingga	2015	4.84	1101600	898376	14130612.26
Kabupaten Purbalingga	2016	-	1377500	907507	14816429.63
Kabupaten Purbalingga	2017	5.33	1522500	916427	15612285.90
Kabupaten Purbalingga	2018	6.02	1655200	925193.00	16458708.49
Kabupaten Purbalingga	2019	4.73	1788500	933989.00	17387610.58
Kabupaten Purbalingga	2020	6.10	1940800	998561	17182873.71
Kabupaten Purbalingga	2021	6.05	1988000	1007794	17731438.00
Kabupaten Banjarnegara	2011	4.97	730000	877207	9952403.66
Kabupaten Banjarnegara	2012	3.69	765000	883694	10473363.43
Kabupaten Banjarnegara	2013	4.16	835000	889921	11043083.01
Kabupaten Banjarnegara	2014	4.06	920000	895986	11629845.85
Kabupaten Banjarnegara	2015	5.05	1112500	901826	12266046.35
Kabupaten Banjarnegara	2016	-	1265000	907410	12932884.85
Kabupaten Banjarnegara	2017	4.72	1370000	912917	13663266.65
Kabupaten Banjarnegara	2018	3.99	1490000	918219.00	14438149.74
Kabupaten Banjarnegara	2019	4.44	1610000	923192.00	15246865.65
Kabupaten Banjarnegara	2020	5.86	1748000	1017767	15045884.99
Kabupaten Banjarnegara	2021	5.86	1805000	1026866	15536477.91
Kabupaten Kebumen	2011	4.73	755000	1167092	13068985.50
Kabupaten Kebumen	2012	3.58	809000	1172036	13707057.24
Kabupaten Kebumen	2013	3.52	849000	1176722	14333333.50
Kabupaten Kebumen	2014	3.25	910000	1181006	15163091.84
Kabupaten Kebumen	2015	4.14	1165000	1184882	16115554.01

Kabupaten Kebumen	2016	-	1300000	1188603	16923719.54
Kabupaten Kebumen	2017	5.58	1445000	1192007	17794789.30
Kabupaten Kebumen	2018	5.48	1573000	1195092.00	18778048.50
Kabupaten Kebumen	2019	4.69	1700000	1197982.00	19815062.62
Kabupaten Kebumen	2020	6.07	1845000	1350438	19527664.95
Kabupaten Kebumen	2021	6.03	1905400	1361913	20253059.43
Kabupaten Purworejo	2011	5.30	727500	699718	8993814.30
Kabupaten Purworejo	2012	3.20	770000	702699	9406242.93
Kabupaten Purworejo	2013	5.15	835000	705483	9870969.95
Kabupaten Purworejo	2014	5.10	975000	708038	10312937.79
Kabupaten Purworejo	2015	4.01	1157500	710386	10862645.98
Kabupaten Purworejo	2016	-	1324600	712686	11421552.22
Kabupaten Purworejo	2017	3.64	1433900	714574	12023780.44
Kabupaten Purworejo	2018	4.43	1560000	716477.00	12664976.05
Kabupaten Purworejo	2019	2.91	1686000	718316.00	13353336.33
Kabupaten Purworejo	2020	4.04	1835000	769880	13138294.11
Kabupaten Purworejo	2021	3.59	1895000	773588	13582556.43
Kabupaten Wonosobo	2011	4.92	775000	760765	9489550.46
Kabupaten Wonosobo	2012	5.21	825000	765189	9935905.32
Kabupaten Wonosobo	2013	5.82	880000	769318	10333757.05
Kabupaten Wonosobo	2014	5.34	990000	773280	10828168.68
Kabupaten Wonosobo	2015	4.47	1166000	777122	11334080.04
Kabupaten Wonosobo	2016	-	1326000	780793	11941198.92
Kabupaten Wonosobo	2017	4.18	1457100	784207	12436048.84
Kabupaten Wonosobo	2018	3.50	1585000	787384.00	13065841.64
Kabupaten Wonosobo	2019	3.43	1712500	790504.00	13793040.27
Kabupaten Wonosobo	2020	5.37	1859000	879124	13566176.25

Kabupaten Wonosobo	2021	5.26	1920000	886613	14064764.70
Kabupaten Magelang	2011	6.83	802500	1196917	15323039.48
Kabupaten Magelang	2012	4.38	870000	1209375	16071142.55
Kabupaten Magelang	2013	6.13	942000	1221681	17020755.61
Kabupaten Magelang	2014	7.45	1152000	1233695	17936288.38
Kabupaten Magelang	2015	5.16	1255000	1245496	18864651.97
Kabupaten Magelang	2016	-	1410000	1257123	19882244.24
Kabupaten Magelang	2017	2.44	1570000	1268396	20974801.01
Kabupaten Magelang	2018	2.89	1742000	1279625.00	22082795.90
Kabupaten Magelang	2019	3.07	1882000	1290591.00	23253154.32
Kabupaten Magelang	2020	4.27	2042200	1299859	22865151.84
Kabupaten Magelang	2021	5.03	2075000	1305512	23661713.24
Kabupaten Boyolali	2011	5.81	800500	938999	14592026.26
Kabupaten Boyolali	2012	4.43	836000	945534	15369974.36
Kabupaten Boyolali	2013	5.44	895000	951817	16266498.68
Kabupaten Boyolali	2014	4.95	1116000	957857	17148350.76
Kabupaten Boyolali	2015	2.03	1197800	963690	18170383.95
Kabupaten Boyolali	2016	-	1403500	969325	19139359.22
Kabupaten Boyolali	2017	3.67	1519289	974579	20248849.44
Kabupaten Boyolali	2018	2.18	1651650	979799	21406268.93
Kabupaten Boyolali	2019	3.09	1790000	984807	22681097.81
Kabupaten Boyolali	2020	5.28	1942500	1062713	22409732.64
Kabupaten Boyolali	2021	5.09	2000000	1070247	23447366.01
Kabupaten Klaten	2011	7.63	766022	1137909	18071350.51
Kabupaten Klaten	2012	3.70	812000	1143633	19102402.71
Kabupaten Klaten	2013	5.34	871500	1148994	20241429.01
Kabupaten Klaten	2014	4.75	1026600	1154040	21424522.36

Kabupaten Klaten	2015	2.51	1170000	1158795	22558976.15
Kabupaten Klaten	2016	-	1400000	1163218	23725740.98
Kabupaten Klaten	2017	4.35	1528500	1167401	24993103.27
Kabupaten Klaten	2018	3.14	1661632.35	1171411.00	26360649.93
Kabupaten Klaten	2019	3.54	1795061.43	1174986.00	27805993.69
Kabupaten Klaten	2020	5.46	1947821.16	1260506	27480359.39
Kabupaten Klaten	2021	5.48	2011515	1267272	28531108.64
Kabupaten Sukoharjo	2011	6.27	790500	833933	17319638.62
Kabupaten Sukoharjo	2012	6.10	843000	841771	18342247.26
Kabupaten Sukoharjo	2013	5.98	902000	849506	19401889.44
Kabupaten Sukoharjo	2014	4.60	1150000	856937	20449009.84
Kabupaten Sukoharjo	2015	4.52	1223000.00	864207	21612078.19
Kabupaten Sukoharjo	2016	-	1396000.00	871397	22847982.81
Kabupaten Sukoharjo	2017	2.27	1513000.00	878374	24163939.48
Kabupaten Sukoharjo	2018	2.72	1648000.00	885205.00	25564065.09
Kabupaten Sukoharjo	2019	3.39	1783500.00	891912.00	27076442.63
Kabupaten Sukoharjo	2020	6.93	1938000.00	907587	26616503.11
Kabupaten Sukoharjo	2021	3.32	1986450.00	911603	27634117.53
Kabupaten Wonogiri	2011	3.82	730000.00	934689	13786711.34
Kabupaten Wonogiri	2012	3.46	775000.00	938641	14605088.22
Kabupaten Wonogiri	2013	3.61	830000.00	942377	15303280.47
Kabupaten Wonogiri	2014	3.45	954000.00	945817	16107795.17
Kabupaten Wonogiri	2015	3.07	1101000.00	949017	16977198.56
Kabupaten Wonogiri	2016	-	1293000.00	951975	17869145.42
Kabupaten Wonogiri	2017	2.38	1401000.00	954706	18818939.39
Kabupaten Wonogiri	2018	2.28	1542000.00	957106.00	19837022.48
Kabupaten Wonogiri	2019	2.55	1655000.00	959492.00	20856209.49

Kabupaten Wonogiri	2020	4.27	1797000	1043177	20563144.42
Kabupaten Wonogiri	2021	2.43	1827000	1049292	21251003.92
Kabupaten Karanganyar	2011	5.78	801500.00	823486	17205063.88
Kabupaten Karanganyar	2012	5.82	846000.00	831916	18219456.66
Kabupaten Karanganyar	2013	3.84	896500.00	840171	19256516.28
Kabupaten Karanganyar	2014	3.54	1060000	848255	20262444.42
Kabupaten Karanganyar	2015	3.60	1226000	856198	21286287.14
Kabupaten Karanganyar	2016	-	1420000	864021	22436293.8
Kabupaten Karanganyar	2017	3.17	1560000.00	871596	23731952.05
Kabupaten Karanganyar	2018	2.28	1696000.00	879078.00	25150277.73
Kabupaten Karanganyar	2019	3.12	1833000.00	886519.00	26599744.09
Kabupaten Karanganyar	2020	5.96	1989000.00	931963	26103228.36
Kabupaten Karanganyar	2021	5.89	2054040.00	938808	27034107.96
Kabupaten Sragen	2011	8.43	760000.00	864029	16870231.27
Kabupaten Sragen	2012	5.88	810000.00	868105	17902104.86
Kabupaten Sragen	2013	5.63	864000.00	871989	19102181.74
Kabupaten Sragen	2014	6.04	960000.00	875600	20169824.79
Kabupaten Sragen	2015	4.51	1105000.00	879027	21390871.20
Kabupaten Sragen	2016	-	1300000.00	882090	22625821.66
Kabupaten Sragen	2017	4.55	1422585.52	885122	23977207.30
Kabupaten Sragen	2018	4.83	1546492.72	887889.00	25356459.51
Kabupaten Sragen	2019	3.32	1673500.00	890518.00	26853059.12
Kabupaten Sragen	2020	4.75	1815914.85	976951	26367261.24
Kabupaten Sragen	2021	4.76	1829500.00	983641	27355145.96
Kabupaten Grobogan	2011	5.33	735000.00	1319775	13172711.96
Kabupaten Grobogan	2012	4.20	785000.00	1328197	13842047.14
Kabupaten Grobogan	2013	6.10	842000.00	1336304	14474728.93

Kabupaten Grobogan	2014	4.25	935000.00	1343960	15064456.66
Kabupaten Grobogan	2015	5.22	1160000.00	1351429	15962619.43
Kabupaten Grobogan	2016	-	1305000.00	1358404	16682629.70
Kabupaten Grobogan	2017	3.02	1435000.00	1365207	17659254.29
Kabupaten Grobogan	2018	2.22	1560000.00	1371610.00	18688571.17
Kabupaten Grobogan	2019	3.54	1685500.00	1377788.00	19692631.32
Kabupaten Grobogan	2020	4.50	1830000.00	1453526	19383027.40
Kabupaten Grobogan	2021	4.38	1890000.00	1460873	20115533.52
Kabupaten Blora	2011	6.90	816200.00	835781	10597723.01
Kabupaten Blora	2012	4.75	855500.00	840208	11116865.91
Kabupaten Blora	2013	6.23	932000.00	844444	11712504.85
Kabupaten Blora	2014	4.30	1009000.00	848369	12227201.29
Kabupaten Blora	2015	4.68	1180000.00	852108	12882587.70
Kabupaten Blora	2016	-	1328500.00	855573	15914663.42
Kabupaten Blora	2017	2.85	1438100.00	858865	16866640.78
Kabupaten Blora	2018	3.30	1564000.00	862110.00	17605216.00
Kabupaten Blora	2019	3.82	1690000.00	865013.00	18318415.14
Kabupaten Blora	2020	4.89	1834000.00	884333	17483886.74
Kabupaten Blora	2021	3.81	1894000.00	886147	18126446.90
Kabupaten Rembang	2011	7.22	757600.00	598122	8808302.78
Kabupaten Rembang	2012	5.75	816000.00	603582	9277163.23
Kabupaten Rembang	2013	5.97	896000.00	608903	9780750.39
Kabupaten Rembang	2014	5.23	985000.00	614087	10284274.36
Kabupaten Rembang	2015	4.51	1120000.00	619173	10850269.20
Kabupaten Rembang	2016	-	1300000.00	624096	11423008.30
Kabupaten Rembang	2017	3.19	1408000.00	628922	12220172.17
Kabupaten Rembang	2018	2.83	1535000.00	633584.00	12939682.29

Kabupaten Rembang	2019	3.60	1660000.00	638188.00	13612335.31
Kabupaten Rembang	2020	4.83	1802000.00	645333	13409631.20
Kabupaten Rembang	2021	3.67	1861000.00	647766	13925516.25
Kabupaten Pati	2011	11.17	769550.00	1201760	19893325.24
Kabupaten Pati	2012	11.98	837500.00	1210025	21072328.70
Kabupaten Pati	2013	7.29	927600.00	1218016	22329693.98
Kabupaten Pati	2014	6.37	1013027.00	1225594	23365213.99
Kabupaten Pati	2015	4.43	1176500.00	1232889	24770325.07
Kabupaten Pati	2016	-	1310000.00	1239989	26130205.34
Kabupaten Pati	2017	3.83	1420500.00	1246691	27612445.94
Kabupaten Pati	2018	3.57	1585000.00	1253299.00	29189879.34
Kabupaten Pati	2019	3.64	1742000.00	1259590.00	30885378.59
Kabupaten Pati	2020	4.74	1891000.00	1324188	30527473.16
Kabupaten Pati	2021	4.60	1953000.00	1330983	31559078.68
Kabupaten Kudus	2011	8.32	840000.00	789939	55175794.89
Kabupaten Kudus	2012	5.89	889000.00	800397	57440810.51
Kabupaten Kudus	2013	8.07	990000.00	810810	59944556.52
Kabupaten Kudus	2014	5.03	1150000.00	821136	62600680.87
Kabupaten Kudus	2015	5.04	1380000.00	831303	65029937.50
Kabupaten Kudus	2016	-	1608200.00	841499	66679583.36
Kabupaten Kudus	2017	3.56	1740900.00	851478	68821162.19
Kabupaten Kudus	2018	3.28	1892500.00	861430.00	71048973.31
Kabupaten Kudus	2019	3.80	2044467.75	871311.00	73241777.45
Kabupaten Kudus	2020	5.53	2218451.95	849184	70961748.50
Kabupaten Kudus	2021	3.77	2290995.00	852443	69556927.81
Kabupaten Jepara	2011	5.48	758000.00	1117847	14004325.03
Kabupaten Jepara	2012	4.29	800000.00	1135574	14824995.87

Kabupaten Jepara	2013	6.34	875000.00	1153213	15623738.87
Kabupaten Jepara	2014	5.09	1000000.00	1170797	16374715.21
Kabupaten Jepara	2015	3.12	1150000.00	1188289	17210365.92
Kabupaten Jepara	2016	-	1350000.00	1205800	18080634.88
Kabupaten Jepara	2017	4.84	1600000.00	1223198	19055335.81
Kabupaten Jepara	2018	3.75	1739360.00	1240600.00	20170255.17
Kabupaten Jepara	2019	2.92	1879031.00	1257912.00	21384282.93
Kabupaten Jepara	2020	6.70	2040000.00	1184947	20973089.31
Kabupaten Jepara	2021	4.23	2107000.00	1188510	21944232.37
Kabupaten Demak	2011	5.03	847987.00	1070278	12275702.69
Kabupaten Demak	2012	8.40	893000.00	1082472	12823227.04
Kabupaten Demak	2013	7.08	995000.00	1094472	13499226.47
Kabupaten Demak	2014	5.17	1280000.00	1106328	14078419.80
Kabupaten Demak	2015	6.02	1535000.00	1117905	14912999.60
Kabupaten Demak	2016	-	1745000.00	1129298	15672482.50
Kabupaten Demak	2017	4.47	1900000.00	1140675	16584124.32
Kabupaten Demak	2018	7.03	2065490.00	1151796.00	17479877.38
Kabupaten Demak	2019	5.42	2240000.00	1162805.00	18417009.99
Kabupaten Demak	2020	7.31	2432000.00	1203956	18374561.64
Kabupaten Demak	2021	5.28	2511526.00	1212377	18856415.63
Kabupaten Semarang	2011	6.16	880000.00	946784	22925456.80
Kabupaten Semarang	2012	4.87	941600.00	960477	24306718.35
Kabupaten Semarang	2013	3.90	1051000.00	974092	25758121.08
Kabupaten Semarang	2014	4.38	1208200.00	987557	27264112.96
Kabupaten Semarang	2015	2.57	1419000.00	1000887	28768327.30
Kabupaten Semarang	2016	-	1610000.00	1014198	30292468.04
Kabupaten Semarang	2017	1.78	1745000.00	1027489	32002984.99

Kabupaten Semarang	2018	2.25	1900000.00	1040629.00	33817679.34
Kabupaten Semarang	2019	2.54	2055000.00	1053786.00	35638961.98
Kabupaten Semarang	2020	4.57	2229880.50	1053094	34688037.34
Kabupaten Semarang	2021	5.02	2302798.00	1059844	35946100.10
Kabupaten Temanggung	2011	3.54	779000.00	717472	10301569.79
Kabupaten Temanggung	2012	3.39	866000.00	724810	10740983.02
Kabupaten Temanggung	2013	4.87	940000.00	731911	11299342.97
Kabupaten Temanggung	2014	3.19	1050000.00	738915	11867679.59
Kabupaten Temanggung	2015	1.50	1178000.00	745825	12489394.54
Kabupaten Temanggung	2016	-	1313000.00	752486	13116363.64
Kabupaten Temanggung	2017	2.97	1431500.00	759128	13776254.81
Kabupaten Temanggung	2018	3.23	1557000.00	765594.00	14483255.21
Kabupaten Temanggung	2019	2.98	1682027.10	772018.00	15214058.87
Kabupaten Temanggung	2020	3.85	1825200.00	790174	14890755.46
Kabupaten Temanggung	2021	2.62	1885000.00	794403	15387930.43
Kabupaten Kendal	2011	6.54	843750.00	910518	20032434.32
Kabupaten Kendal	2012	6.31	904500.00	918763	21075717.33
Kabupaten Kendal	2013	6.43	953100.00	926812	22386123.50
Kabupaten Kendal	2014	6.15	1206000.00	934643	23536834.39
Kabupaten Kendal	2015	7.07	1383450.00	942283	24762325.36
Kabupaten Kendal	2016	-	1639600.00	949682	26139414.95
Kabupaten Kendal	2017	4.93	1774867.00	957024	27649777.07
Kabupaten Kendal	2018	6.02	1929458.00	964106.00	29245664.52
Kabupaten Kendal	2019	6.26	2084393.48	971086.00	30916386.47
Kabupaten Kendal	2020	7.56	2261775.00	1018505	30449024.40
Kabupaten Kendal	2021	7.55	2335735.00	1025020	31632276.02
Kabupaten Batang	2011	6.66	805000.00	715494	10025044.65

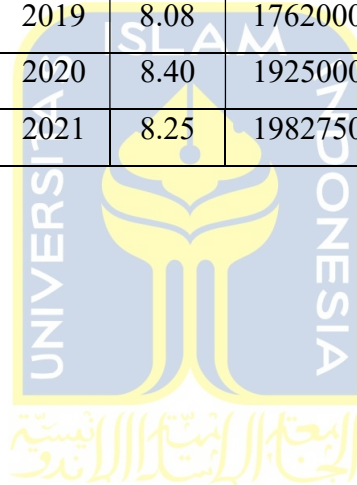
Kabupaten Batang	2012	5.88	880000.00	722634	10488456.63
Kabupaten Batang	2013	7.02	970000.00	729616	11104696.78
Kabupaten Batang	2014	7.42	1146000.00	736397	11693897.06
Kabupaten Batang	2015	4.56	1270000.00	743090	12328239.23
Kabupaten Batang	2016	-	1467500.00	749720	12948191.13
Kabupaten Batang	2017	5.82	1603000.00	756079	13667079.80
Kabupaten Batang	2018	4.20	1749900.00	762377.00	14448625.81
Kabupaten Batang	2019	4.11	1900000.00	768583.00	15226786.53
Kabupaten Batang	2020	6.92	2061700.00	801718	15031083.84
Kabupaten Batang	2021	6.59	2129117.00	807005	15764265.54
Kabupaten Pekalongan	2011	6.91	810000.00	847379	10834201.09
Kabupaten Pekalongan	2012	5.08	873000.00	854287	11354849.90
Kabupaten Pekalongan	2013	4.78	962000.00	861082	12034805.89
Kabupaten Pekalongan	2014	6.03	1145000.00	867573	12630368.82
Kabupaten Pekalongan	2015	5.10	1271000.00	873986	13234564.04
Kabupaten Pekalongan	2016	-	1463000.00	880092	13921651.83
Kabupaten Pekalongan	2017	4.39	1583697.50	886197	14679128.72
Kabupaten Pekalongan	2018	4.36	1721637.55	891892.00	15525050.94
Kabupaten Pekalongan	2019	4.35	1859885.05	897711.00	16356350.99
Kabupaten Pekalongan	2020	6.97	2018161.27	968821	16047511.77
Kabupaten Pekalongan	2021	4.28	2084155.00	976504	16615065.66
Kabupaten Pemasang	2011	7.37	725000.00	1269077	11847199.06
Kabupaten Pemasang	2012	4.85	793000.00	1274475	12477235.25
Kabupaten Pemasang	2013	6.48	908000.00	1279596	13172063.61
Kabupaten Pemasang	2014	7.44	1066000.00	1284236	13898669.42
Kabupaten Pemasang	2015	6.53	1193400.00	1288577	14673696.23
Kabupaten Pemasang	2016	-	1325000.00	1292609	15469800.59

Kabupaten Pemalang	2017	5.59	1460000.00	1296281	16336984.00
Kabupaten Pemalang	2018	6.17	1588000.00	1299724.00	17265888.82
Kabupaten Pemalang	2019	6.45	1718000.00	1302813.00	18267199.78
Kabupaten Pemalang	2020	7.64	1865000.00	1471489	18155597.42
Kabupaten Pemalang	2021	6.71	1926000.00	1484209	18916261.68
Kabupaten Tegal	2011	10.59	725000.00	1403425	16071820.41
Kabupaten Tegal	2012	6.12	780000.00	1409406	16912249.74
Kabupaten Tegal	2013	6.89	850000.00	1415009	18050291.97
Kabupaten Tegal	2014	8.47	1000000.00	1420132	18958841.04
Kabupaten Tegal	2015	9.52	1155000.00	1424891	19999475.45
Kabupaten Tegal	2016	-	1373000.00	1429386	21182917.23
Kabupaten Tegal	2017	7.33	1487000.00	1433515	22322100.13
Kabupaten Tegal	2018	8.24	1617000.00	1437225.00	23552548.37
Kabupaten Tegal	2019	8.12	1747000.00	1440698.00	24861495.83
Kabupaten Tegal	2020	9.82	1896000.00	1596996	24492665.57
Kabupaten Tegal	2021	9.97	1958000.00	1608611	25402911.06
Kabupaten Brebes	2011	11.08	717000.00	1746529	21498422.48
Kabupaten Brebes	2012	8.22	775000.00	1756196	22482262.67
Kabupaten Brebes	2013	9.61	859000.00	1764648	23812056.92
Kabupaten Brebes	2014	9.53	1000000.00	1773379	25074171.51
Kabupaten Brebes	2015	6.49	1166550.00	1781379	26572834.89
Kabupaten Brebes	2016	-	1310000.00	1788880	27930986.28
Kabupaten Brebes	2017	8.04	1418100.00	1796004	29509206.81
Kabupaten Brebes	2018	7.20	1542000.00	1802829.00	31060106.12
Kabupaten Brebes	2019	7.39	1665850.00	1809096.00	32847862.67
Kabupaten Brebes	2020	9.83	1807614.00	1978759	32693080.65
Kabupaten Brebes	2021	9.78	1866723.00	1992685	33456328.43

Kota Magelang	2011	11.51	795000.00	118957	4255662.21
Kota Magelang	2012	8.99	837000.00	119523	4484268.08
Kota Magelang	2013	6.75	901500.00	119935	4755092.20
Kota Magelang	2014	7.38	1037000.00	120373	4992112.82
Kota Magelang	2015	6.43	1211000.00	120792	5247341.27
Kota Magelang	2016	-	1341000.00	121112	5521525.54
Kota Magelang	2017	6.68	1453000.00	121474	5820532.00
Kota Magelang	2018	4.78	1580000.00	121872.00	6138622.75
Kota Magelang	2019	4.37	1707000.00	122111.00	6470539.51
Kota Magelang	2020	8.59	1853000.00	121526	6312054.41
Kota Magelang	2021	8.73	1914000.00	121610	6513894.68
Kota Surakarta	2011	7.70	826252.00	502866	22848439.42
Kota Surakarta	2012	6.29	864450.00	505413	24123781.59
Kota Surakarta	2013	7.22	915900.00	507825	25631681.32
Kota Surakarta	2014	6.16	1145000.00	510077	26984358.61
Kota Surakarta	2015	4.53	1222400.00	512226	28453493.87
Kota Surakarta	2016	-	1418000.00	514171	29975873.01
Kota Surakarta	2017	4.47	1534985.00	516102	31685480.46
Kota Surakarta	2018	4.35	1668700.00	517887.00	33505900.66
Kota Surakarta	2019	4.16	1802700.00	519587.00	35441107.67
Kota Surakarta	2020	7.92	1956200.00	522364	34815965.32
Kota Surakarta	2021	7.85	2013810.00	522728	36211248.26
Kota Salatiga	2011	9.02	843469.00	173402	6230219.49
Kota Salatiga	2012	6.84	901396.00	176031	6574907.26
Kota Salatiga	2013	6.21	974000.00	178594	6989045.50
Kota Salatiga	2014	4.46	1170000.00	181193	7378042.82
Kota Salatiga	2015	6.43	1287000.00	183815	7759181.62

Kota Salatiga	2016	-	1450953.00	186420	8168241.90
Kota Salatiga	2017	3.96	1596844.87	188928	8624240.98
Kota Salatiga	2018	4.23	1735930.06	191571.00	9127857.77
Kota Salatiga	2019	4.33	1875325.24	194084.00	9666446.31
Kota Salatiga	2020	7.44	2034915.42	192322	9503711.49
Kota Salatiga	2021	7.26	2101457.00	193525	9820286.85
Kota Semarang	2011	7.65	961320.00	1588408	86142966.70
Kota Semarang	2012	6.01	991500.00	1616596	91282029.07
Kota Semarang	2013	6.02	1209100.00	1644800	96985402.04
Kota Semarang	2014	7.76	1435000.00	1672999	103109874.91
Kota Semarang	2015	5.77	1685000.00	1701114	109110689.61
Kota Semarang	2016	-	1909000.00	1729083	115542560.57
Kota Semarang	2017	6.61	2125000.00	1757686	123279891.91
Kota Semarang	2018	5.21	2310087.50	1786114.00	131266362.57
Kota Semarang	2019	4.50	2498587.53	1814110.00	140199517.36
Kota Semarang	2020	9.57	2715000.00	1653524	137609712.18
Kota Semarang	2021	9.54	2810025.00	1656564	144710662.93
Kota Pekalongan	2011	8.06	810000.00	285026	4878332.22
Kota Pekalongan	2012	7.67	895500.00	287978	5151813.52
Kota Pekalongan	2013	5.28	980000.00	290870	5456196.88
Kota Pekalongan	2014	5.42	1165000.00	293704	5755282.26
Kota Pekalongan	2015	4.10	1291000.00	296404	6043095.73
Kota Pekalongan	2016	-	1500000.00	299222	6367272.96
Kota Pekalongan	2017	5.05	1623750.00	301870	6706278.70
Kota Pekalongan	2018	6.08	1765178.63	304477.00	7087915.58
Kota Pekalongan	2019	5.80	1906922.47	307097.00	7477425.04
Kota Pekalongan	2020	7.02	2072000.00	307150	7337833.89

Kota Pekalongan	2021	6.89	2139754.00	308310	7601486.23
Kota Tegal	2011	9.77	735000.00	241402	7341540.16
Kota Tegal	2012	8.75	795000.00	242605	7650479.56
Kota Tegal	2013	9.32	860000.00	243860	8084175.73
Kota Tegal	2014	9.20	1044000.00	244998	8491325.37
Kota Tegal	2015	8.06	1206000.00	246119	8953879.56
Kota Tegal	2016	-	1385000.00	247212	9445030.96
Kota Tegal	2017	8.19	1499500.00	248094	10006943.00
Kota Tegal	2018	7.81	1630500.00	249003.00	10594340.17
Kota Tegal	2019	8.08	1762000.00	249905.00	11205782.88
Kota Tegal	2020	8.40	1925000.00	273825	10949122.06
Kota Tegal	2021	8.25	1982750.00	275781	11290268.87



B. Lampiran 2 – Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: TINGKAT_PENGANGGURAN_TERBUKA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/16/22 Time: 15:49
 Sample: 2011 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.14302	4.451739	4.749385	0.0000
LOG(UPAH_MINIMUM)	-1.300548	0.304709	-4.268167	0.0000
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	-0.854375	0.227320	-3.758475	0.0002
LOG(PDRB)	0.857328	0.223121	3.842425	0.0001
R-squared	0.072387	Mean dependent var		5.512943
Adjusted R-squared	0.064344	S.D. dependent var		1.940621
S.E. of regression	1.877149	Akaike info criterion		4.108748
Sum squared resid	1219.196	Schwarz criterion		4.152839
Log likelihood	-715.0309	Hannan-Quinn criter.		4.126298
F-statistic	9.000136	Durbin-Watson stat		0.636693
Prob(F-statistic)	0.000009			

C. Lampiran 3 – Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: TINGKAT_PENGANGGURAN_TERBUKA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/16/22 Time: 15:53
 Sample: 2011 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-35.89096	45.23767	-0.793387	0.4282
LOG(UPAH_MINIMUM)	1.645049	0.989200	1.663009	0.0973
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	12.15471	2.943437	4.129427	0.0000
LOG(PDRB)	-8.825378	1.993010	-4.428166	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.628993	Mean dependent var	5.512943
Adjusted R-squared	0.584995	S.D. dependent var	1.940621
S.E. of regression	1.250164	Akaike info criterion	3.386640
Sum squared resid	487.6282	Schwarz criterion	3.805501
Log likelihood	-554.6620	Hannan-Quinn criter.	3.553362
F-statistic	14.29607	Durbin-Watson stat	1.355094

Prob(F-statistic) 0.000000

D. Lampiran 4 – Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: TINGKAT_PENGANGGURAN_TERBUKA
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/16/22 Time: 15:55
 Sample: 2011 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.80355	5.729337	3.631058	0.0003
LOG(UPAH_MINIMUM)	-1.000155	0.279201	-3.582209	0.0004
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	0.117402	0.530555	0.221281	0.8250
LOG(PDRB)	-0.167704	0.513928	-0.326318	0.7444
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.385846	0.5513
Idiosyncratic random			1.250164	0.4487
Weighted Statistics				
R-squared	0.073145	Mean dependent var		1.512331
Adjusted R-squared	0.065109	S.D. dependent var		1.375834
S.E. of regression	1.330290	Sum squared resid		612.3068
F-statistic	9.101864	Durbin-Watson stat		1.238636
Prob(F-statistic)	0.000008			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.007728	Mean dependent var		5.512943
Sum squared resid	1304.180	Durbin-Watson stat		0.581534

E. Lampiran 5 – Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.767068	(34,312)	0.0000
Cross-section Chi-square	320.737786	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: TINGKAT_PENGANGGURAN_TERBUKA
Method: Panel Least Squares
Date: 11/16/22 Time: 15:54
Sample: 2011 2021
Periods included: 10
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 350

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.14302	4.451739	4.749385	0.0000
LOG(UPAH_MINIMUM)	-1.300548	0.304709	-4.268167	0.0000
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	-0.854375	0.227320	-3.758475	0.0002
LOG(PDRB)	0.857328	0.223121	3.842425	0.0001
R-squared	0.072387	Mean dependent var		5.512943
Adjusted R-squared	0.064344	S.D. dependent var		1.940621
S.E. of regression	1.877149	Akaike info criterion		4.108748
Sum squared resid	1219.196	Schwarz criterion		4.152839
Log likelihood	-715.0309	Hannan-Quinn criter.		4.126298
F-statistic	9.000136	Durbin-Watson stat		0.636693
Prob(F-statistic)	0.000009			

F. Lampiran 6 – Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	48.773283	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(UPAH_MINIMUM)	1.645049	-1.000155	0.900564	0.0053
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	12.154707	0.117402	8.382334	0.0000
LOG(PDRB)	-8.825378	-0.167704	3.707966	0.0000

Cross-section random effects test equation:
 Dependent Variable: TINGKAT_PENGANGGURAN_TERBUKA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/16/22 Time: 15:58
 Sample: 2011 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-35.89096	45.23767	-0.793387	0.4282
LOG(UPAH_MINIMUM)	1.645049	0.989200	1.663009	0.0973
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	12.15471	2.943437	4.129427	0.0000
LOG(PDRB)	-8.825378	1.993010	-4.428166	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.628993	Mean dependent var	5.512943
Adjusted R-squared	0.584995	S.D. dependent var	1.940621
S.E. of regression	1.250164	Akaike info criterion	3.386640
Sum squared resid	487.6282	Schwarz criterion	3.805501
Log likelihood	-554.6620	Hannan-Quinn criter.	3.553362
F-statistic	14.29607	Durbin-Watson stat	1.355094
Prob(F-statistic)	0.000000		

